

HARIAN PAGI Tribun Jateng SPIRIT BARU JAWA TENGAH

Gedung Kompas Gramedia
Jl. Menteri Supeno 30
Semarang 50241
Telp: (024) 845 5959
Fax: (024) 845 6776

SENIN WAGE
9 JANUARI 2017
10 RABIUL AKHIR 1438
TAHUN III/NOMOR 1334

Harga: Rp 1.000
Langganan: Rp 29.000
Harga khusus Solo: Rp 2.000 ■
Langganan: Rp 55.000 ■

→ www.tribunjateng.com

NEWS ANALYSIS | PROF DR SRI SUWITRI MSI
KAPRODI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNDIK



IST

Perkuat Komisi Aparatur Sipil Negara

PRAKTIK jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia, khususnya Jawa Tengah besar kemungkinan terjadi bukan hanya di Klaten. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan.

Seharusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas dalam pengawasan. Tapi KASN merupakan lembaga baru yang masih perlu *capacity building*, anggaran dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM).

Sebelumnya bahkan ada pemikir-

an KASN mau dibubarkan karena dianggap tak efektif. Pemikiran seperti ini harus dihapus.

Kita harus dukung Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan eksistensi KASN.

Pansel saat ini masih ditentukan oleh Pemda/Pemkot. Belum ada dalam pansel dimana ada anggota KASN bertindak sebagai pengawas.

Anggota KASN jumlahnya terbatas sehingga KASN harus banyak me-

Perkuat Komisi...

■ DARI HALAMAN 1

manjangkan tangan, melatih orang-orang independen sebagai pengawas pansel di tiap daerah. Bukan hanya saat proses seleksi tapi juga pengawasan pascaseleksi. Apabila ada indikasi jual beli, data akurat segera laporkan ke KASN.

KASN harus segera bentuk kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika peran KASN dan

KPK sudah bagus, Inshaallah praktik jual beli jabatan bisa dihapuskan.

Pansel sendiri sebelum menjadi pansel harus mendapat pelatihan dari KASN. Intinya jangan memandulkan UU ASN dan peran KASN. Semua lembaga terkait harus diperkuat tapi pusat pengawasan tetap di KASN. Untuk Indonesia permasalahan ini harus diperbaiki lang-

sung ke sumber penyakitnya. Intinya perkuat KASN.

Pengawasan ada di KASN dimulai dari pembentukan pansel dan proses seleksi. Tapi KASN masih belum kuat perannya karena masih banyak masalah teknis dan harus ditata. Akibatnya sekarang tiap daerah masih berdasarkan otonomi daerah masing-masing termasuk pengawasannya. Di sini-lah akhirnya terjadi penyele-
ngan. (tim)

■ KE HALAMAN 7